

## BAB IV

### ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

#### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut ini diuraikan mengenai **permasalahan pembangunan** dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diperkirakan masih dihadapi oleh Kota Cilegon dalam periode tahun 2013-2015.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
A.	Urusan Wajib			
1.	Pendidikan			Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan pada usia dini</li> <li>Belum adanya pemetaan kebutuhan sekolah seperti rasio kebutuhan satuan pendidikan terhadap permukiman permanen, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan rombongan belajar</li> <li>Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pengajar dalam mengembangkan kemampuan peserta didik dan masih belum optimalnya penerapan RPP berdasarkan silabus</li> <li>Masih belum optimalnya rasio guru terhadap murid, sehingga ada beberapa guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran, semata mata hanya untuk memenuhi standar jam wajib tatap muka antara murid dan guru</li> <li>Masih ada guru yang menyandang pendidikan yang di bawah S1 dan D-IV</li> <li>Masih adanya beberapa jejang pendidikan yang belum mampu mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif atau pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan.</li> <li>Masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan/memberlakukan aturan jumlah siswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan sosialisasi secara optimal tentang pemberian pendidikan anak di masa masa golden age (usia dini) baik secara langsung maupun dilakukan melalui bantuan media cetak dan elektronik</li> <li>Di terbitkannya regulasi tentang pemetaan rasio kebutuhan sekolah melalui penelitian kebutuhan satuan biaya pendidikan terhadap pemukiman permanen</li> <li>Peningkatan kapasitas kemampuan tenaga pendidik melalui diklat dikat yang di lakukan secara eksternal maupun internal</li> <li>Pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar terhadap jumlah siswa yang ada di Kota Cilegon melalui perekrutan yang profesional</li> <li>Perlu peningkatan strus tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kebutuhan tenaga pengajar</li> <li>Peningkatan pengawaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Kota Cilegon yang lebih optimal</li> <li>Adanya regulasi tentang jumlah siswa perkelas yang sesuai dengan standar nasional.</li> <li>Peningkatan dan pengembangan Ruang kelas baru didalam pemenuhan kebutuhan jumlah siswa yang</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>per ruang kelas yang sesuai standar nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya fasilitas pelayanan pendidikan seperti daya tampung ruang kelas dan ruang laboratorium pada masing masing jenjang pendidikan</li> <li>Masih perlunya penanganan rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya ditingkat dasar, menengah dan kejuruan</li> <li>Pembebasan biaya pendidikan yang di berikan saat ini masih belum spesifik kepada masyarakat rumah tangga sasaran</li> <li>Evaluasi diri sekolah belum berjalan secara optimal.</li> </ul>	<p>ada pada jenjang pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlunya penanganan rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya ditingkat dasar, menengah dan kejuruan</li> <li>Perlu dilakukan analisis secara tepat dan komperhensif sehingga pemberian pembebasan biaya pendidikan dapat benar benar di rskan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam rangka pengentas wajib belajar 12 tahun</li> <li>Perlunya penerapakan evaluasi diri sekolah kepada sekolah.</li> </ul>	
2.	Kesehatan			Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara umum ketersediaan sarana prasarana kesehatan telah cukup tersedia, walaupun di beberapa wilayah masih ada yang belum terlayani sarana kesehatan secara memadai. Kebutuhan akan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar di beberapa wilayah masih sangat diperlukan</li> <li>Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas</li> <li>Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh</li> <li>Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan secara merata, bermutu dan terjangkau seperti rehabilitasi, peningkatan status, dan pembangunan fasilitas kesehatan.</li> <li>Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam pencapaian target MDG's</li> <li>Penanganan permasalahan gizi secara menyeluruh</li> <li>Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat</li> <li>Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini</li> <li>Penataan dan pengembangan sistem informasi</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber dari APBD Kota Cilegon belum masih mengutamakan prasarana dan sarana kesehatan belum mengutamakan upaya pencegahan, promosi kesehatan, peningkatan pelayanan lansia, peningkatan pelayanan balita dan keselamatan ibu melahirkan dan anak.</li> <li>• Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas tenaga kesehatan juga perlu untuk ditingkatkan. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.</li> <li>• Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas</li> <li>• Masyarakat cenderung masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum optimal merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Disamping itu pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya</li> </ul>	<p>kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif</li> <li>• Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk mencapai indikator SPM dan MDG's</li> <li>• Peningkatan sumber daya kesehatan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kota Cilegon terutama di daerah kurang diminati dan rawan bencana</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan dasar</li> <li>• Optimalisasi fasilitas kesehatan yang ada terutama Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes sebagai salah satu wadah di masyarakat untuk mampu merubah masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, baik peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM tenaga kesehatan RSUD.</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit semakin meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin. Untuk meningkatkan akses tersebut, pemerintah memiliki keterbatasan pada jumlah tempat tidur (bed) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu dalam pelaksanaannya sistem rujukan belum dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan relatif kurang optimal dan efisien.</li> </ul>		
3.	Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum
		<p><b><u>Pemenuhan Infrastruktur Jalan Kota yang berstandar</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>penyediaan infrastruktur jalan masih belum dapat diandalkan sebagai pendukung perekonomian kota dalam memberikan pelayanan mobilitas orang, barang dan jasa.</li> <li>Bercampurnya pergerakan lalu lintas dan berat beban kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan di Kota Cilegon menyebabkan penurunan kualitas dan pelayanan jalan.</li> <li>keterbatasan anggaran dalam mengatasi tingginya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>sosialisasi yang intensif</b> kepada masyarakat terkait kesadaran masyarakat terhadap dukungan pembangunan jalan</li> <li><b>penambahan alokasi anggaran</b>, penerbitan peraturan yang mengatur kapasitas kendaraan sesuai dengan klas jalan dan penanganan jalan sesuai dengan kebutuhan kelengkapannya</li> <li>Perlunya usaha membagi beban kepadatan arus lintas pada rute alternatif</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>nilai lahan terhadap kegiatan pelebaran jalan</p> <p><b>Bencana Banjir dan Genangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>terjadinya banjir, saat penghujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan durasi yang cukup lama ditambah dengan saluran-saluran utama yang kapasitasnya sangat berkurang sehingga tidak dapat lagi menampung debit air limpasan baik dari air hujan maupun air buangan dari penduduk.</li> <li>Pemanfaatan saluran drainase yang <b>menjadi satu dengan saluran irigasi</b> salah satu penyebab timbulnya genangan, masuknya air limpasan dari daerah permukiman dan areal persawahan secara bersamaan menyebabkan</li> <li>saluran drainase yang ada tidak mampu menampung debit air akibat saluran drainase dan irigasi yang menjadi satu</li> <li>penyumbatan saluran akibat banyak nya sampah dan sedimentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>koordinasi intensif dan terpadu terkait penanganan saluran dan gorong-gorong</b> di ruas jalan nasional dan diperlukan payung hukum terkait penataan atau relokasi bangunan-bangunan yang menimbulkan penyebab banjir.</li> <li>dukungan <b>anggaran yang besar</b> guna melakukan peningkatan dan pembangunan saluran.</li> <li>Perlunya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengaturan saluran drainase dan Irigasi</li> <li>Penyuluhan dan kampanye kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran drainase</li> </ul>	
4	Perumahan			Dinas Pekerjaan Umum
		<ul style="list-style-type: none"> <li>permukiman kumuh karena dipicu oleh tingkat urbanisasi dan tingginya nilai lahan, Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidak mampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>peran aktif masyarakat dan koordinasi intensif dengan instansi/SKPD teknis lain.</li> <li>Upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.</li> <li>Pemerintah Kota Cilegon dan Pusat harus bersinergi terhadap pembangunan RUSUNAWA</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan.</li> <li>• Adanya permasalahan kawasan kumuh dan pemenuhan rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.</li> <li>• Sulitnya jangkauan ketersediaan pada lingkungan perumahan yang hanya dilalui jalan setapak atau jalan kecil/gang.</li> <li>• Kesulitan perawatan jaringan kabel lampu Hias yang berada di bawah tanah mengalami kerusakan (terbakar) karena tertanam di tengah median jalan protokol tanpa dilengkapi casing pelindung berupa pipa, terpasangnya pot permanen dan pagar besi pada median jalan.</li> <li>• Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam melaksanakan perawatan jaringan kabel tersebut.</li> <li>• Terjadinya kerusakan diluar dari pada kebiasaan/rutin pemeliharaan, seperti trafo yang meledak menyulitkan petugas pemelihara dalam memperbaiki jaringan PJU dari trafo tersebut.</li> <li>• Kegiatan optimalisasi dan Revitalisasi PJU mengalami kendala dalam ketersediaan data pendukung berupa jumlah dan panjang jalan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi yang dipasang pada jalan kecil/gang cukup dengan neonisasi(lampu neon 40 watt). Pemasangannya dapat dianggarkan dari APBD namun dalam hal pembayaran rekening dan pemeliharaannya dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat sekitar. Solusi ini harus diiringi dengan kesadaran masyarakat, bahwa jaringan PJU tersebut adalah milik mereka dan harus dirawat serta dikelola secara bersama-sama.</li> <li>• Pemeliharaan Lampu Hias, dimana jaringan kabel yang tertanam harus dibungkus dengan casing dan diletakkan tidak pada tengah median, tetapi terpasang pada sisi kanan/kiri median.</li> <li>• Dibutuhkan pula koordinasi intensif dengan SKPD lain dalam mengelola median jalan protokol.</li> <li>• Pemeliharaan PJU, sebaiknya pengadaan barang/suku cadang listrik yang sulit diprediksi kebutuhannya baik jenis maupun jumlahnya, penyediaannya terpisah dari suku cadang yang bersifat rutin. Pengadaan suku cadang yang bersifat insidental tersebut diadakan sesuai dengan kejadian kerusakan.</li> <li>• Pelibatan personil dari instansi/SKPD teknis lainnya harus dibentuk tim teknis, agar dapat memperlancar ketersediaan data dan proses penyusunan dokumen terkait dengan Revitalisasi dan Optimalisasi PJU</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
5.	Penataan Ruang			Dinas Tata Kota
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan RTRW Kota Cilegon menghadapi dinamika pemanfaatan ruang yang tumbuh pesat di Kota Cilegon. Hal ini menjadi tantangan karena bagaimanapun regulasi harus tetap dijalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• belum tersedianya juklak dan juknis prasarana kota, reklame dan tower. Selama ini acuan juklak dan juknis tersebut mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada, seperti Peraturan Menteri dan sebagainya.</li> <li>• ketiadaan data-data seperti data jumlah kelurahan yang telah terlayani oleh prasarana kota ; data jumlah kawasan yang sudah direvitalisasi secara arsitektural ; data jumlah bangunan yang sudah dievaluasi kualitasnya ; maupun data jumlah reklame yang sudah dievaluasi kualitasnya.</li> <li>• Kurangnya anggaran Pemerintah untuk Pemasangan Baliho Promosi dan Propaganda Pemerintah Daerah,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya perencanaan yang bersifat rinci yang merupakan turunan dari perencanaan yang bersifat umum yang telah ada yaitu RTRW. dapat menjawab tantangan dari pesatnya dinamika pemanfaatan ruang.</li> <li>• Perlunya dibuatkan juklak dan Juknis untuk pelaksanaan untuk pengaturan prasarana kota</li> <li>• Perlunya diadakan pendataan aset yang berhubungan dengan prasarana kota</li> <li>• Bentuk dari Baliho dan promosi ini adalah berupa digital printing dengan bahan vinyl dan dipasang pada 5 Bando dan 2 baligo diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk peran serta pihak swasta yaitu biro advertising dalam menyampaikan pesan program-program pembangunan pemerintah Kota Cilegon. Dengan demikian, terjadi efisiensi APBD yang diperoleh karena peran aktif swasta (public private partnership).</li> </ul>	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
6.	Perencanaan Pembangunan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya SDM perencanaan dalam pemahaman pelaksanaan tupoksi, sehingga masih belum maksimalnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, baik dalam koordinasi maupun pemahaman pada pemanfaatan teknologi dan informasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan</li> <li>• Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana masih menggunakan analisa sederhana yang dalam hal ini terbatas pada analisa sektoral atau per program, yang dapat mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan bersifat solusi sektoral atau tidak terintegrasi dengan penyelesaian masalah di sektor lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (<i>skill</i>) yang sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.</li> <li>• Pemahaman mengenai metoda tentang analisis perencanaan yang terintegrasi, hendaknya menjadi materi wajib yang harus dimiliki oleh SDM perencana Bappeda, yang dapat diperoleh baik melalui diklat/kursus singkat ataupun workshop internal</li> </ul>	
7.	Perhubungan			Dinas Perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya ketertiban pengguna jalan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kesadaran pengguna jalan dalam menggunakan alat keselamatan berkendara seperti sabuk pengaman, helm, dll.</li> <li>• Masih banyaknya perlintasan sebidang (jalan dengan rel kereta api) yang tidak dilengkapi dengan pintu perlintasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.</li> <li>• Melengkapi setiap perlintasan sebidang dengan pintu perlintasan serta meminimalisir perencanaan pembangunan jalan sebidang dengan rel.</li> <li>• Pembatasan angkutan umum yang melintas di jalur protokol terutama pada jam-jam sibuk.</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruas jalan protokol yang kecil tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kendaraan yang melintas.</li> <li>• Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa) di sepanjang jalan protokol yang tidak dilengkapi dengan lahan parkir yang memadai.</li> <li>• Banyaknya awak angkutan kota yang tidak mematuhi rute yang telah ditentukan sehingga semua angkutan kota hanya tertumpu pada ruas jalan protokol.</li> <li>• Tingginya biaya BBM menyebabkan tingginya ongkos angkutan kota. Namun di sisi lain akses masyarakat dalam kepemilikan sepeda motor semakin mudah yang pada akhirnya berakibat pada banyaknya angkutan kota yang kosong karena tidak ada penumpang.</li> <li>• Pelayanan perhubungan laut oleh Dishub Kota Cilegon terkendala oleh batasan wilayah laut yang menjadi kewenangan Kota, yaitu hanya 4 mil wilayah laut, sehingga tidak ada kegiatan pelayanan perhubungan laut yang signifikan karena telah dilakukan oleh ADPEL.</li> <li>• Minimnya jumlah petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan, serta pelayaran dan kelautan.</li> <li>• Adanya tumpang tindih tupoksi antara Dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penertiban kendaraan yang parkir di bahu jalan, pembangunan gedung khusus parkir di sekitar jalan protokol, serta membuat Perda tentang Perparkiran.</li> <li>• Penertiban angkutan kota yang tidak mematuhi rute yang telah ditentukan.</li> <li>• Perlunya kajian pengembangan sistem angkutan umum kota Cilegon yang bersifat solutif terhadap permasalahan transportasi</li> <li>• Perlunya pengendalian efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan perhubungan laut oleh Dishub Kota Cilegon.</li> <li>• Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti diklat bersertifikat.</li> <li>• Merevisi Perwal tentang SOTK di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon..</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		Perhubungan dengan Dinas Tata Kota dalam hal penyediaan penerangan jalan umum (PJU) dan jembatan penyeberangan orang (JPO), dimana dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ keduanya merupakan bagian dari perlengkapan jalan.		
8.	Lingkungan Hidup			Badan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan timbulan Sampah dari masyarakat yang belum dapat terkendali secara maksimal</li> <li>• pengelolaan sampah di masyarakat maupun di TPA Bagendung yang masih membebani APBD</li> <li>• masih ada perusahaan yang mendapat peringkat merah dalam hal pencemaran air. Demikian pula masih terdapat pencemaran air yang diakibatkan usaha atau kegiatan. Untuk penanganan limbah B3, ternyata masih ada perusahaan yang belum memiliki izin, baik izin pengumpulan maupun izin TPS B3, masih ada kawasan dengan kondisi yang melebihi baku mutu ambien kualitas udara.</li> <li>• belum adanya lahan kritis yang direhabilitasi terdapat hutan yang berada pada pengelolaan Perhutani sehingga hutan yang ada di luar kewenangan dari Pemerintah Kota Cilegon.</li> <li>• keberadaan hutan kota yang walaupun telah ditetapkan dalam RTRW Kota Cilegon namun keberadaannya bukan dalam pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek peran serta masyarakat harus ditingkatkan sehingga potensi yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan</li> <li>• pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan, sosialisasi, mendorong pemerintah pusat dan propinsi dalam mensinkronkan program persampahan di Kota Cilegon</li> <li>• Perlu adanya pos pengaduan masyarakat sebagai akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk ditindaklanjuti.</li> <li>• Perlunya koordinasi dengan pihak Perhutani untuk mengatasi permasalahan lahan kritis</li> <li>• perbaikan yang dilakukan Pada aspek manajemen terutama adalah mempertegas wewenang pengelola dan menyusun uraian tugas dan tatalaksana kerja yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan pola operasional yang akan dilaksanakan.</li> <li>• memperkirakan kebutuhan biaya yang akan</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Pemerintah Kota. Hal lain adalah ketidaktersedian data terkait dengan prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan. Padahal hal ini merupakan bagian dari SPM bidang lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keberadaan sumur resapan dimana belum terpenuhinya kebutuhan sumur resapan dibandingkan dengan luas tutupan lahan, sehingga pada kegiatan selanjutnya hendaknya difokuskan pada penggunaan lahan dengan kegiatan budidaya.</li> <li>• Selain hutan kota, ketidaktersedian data mengenai kawasan perlindungan setempat menjadi permasalahan, padahal kawasan ini telah ditetapkan dalam RTRW Kota Cilegon, artinya perlu ada program atau kegiatan yang berkaitan dengan rencana ruang kawasan tersebut sesuai dengan umur rencana yaitu 20 tahun.</li> <li>• Terbatasnya jumlah SDM bidang lingkungan hidup yang handal.</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengendalian lingkungan hidup.</li> </ul>	<p>diperlukan dalam rangka pelaksanaan aspek pembiayaan, juga ditetapkan rencana struktur retribusi yang mampu membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar rencana yang disusun diatas dapat dilaksanakan maka akan diperbaiki juga aspek pengaturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan, sehingga peraturan yang ada akan dapat menunjang rencana perbaikan yang akan dilakukan. .</li> <li>• Pengadaan Mobil Laboratorium, Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan B3 dan limbah B3, Inventarisasi kegiatan/usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan Pembuatan sumur resapan DED Hutan Kota di Cibeber Penghijauan Hutan Kota di Cibeber, Inventarisasi kawasan perlindungan setempat Penghijauan Lahan Kritis</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penghijauan lahan Kritis</li> </ul>	
9.	Pertanahan			Sekretariat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Pemerintah Desa menjadi Kelurahan berpengaruh terhadap tanah bengkok yang menjadi eks tanah bengkok sebagai tanah negara yang diberikan kepada daerah sebagai aset daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemerintah daerah kota Cilegon harus memverifikasi tanah eks bengkok dalam mengurus status kepemilikan tanah sampai dengan keluarnya sertifikat tanah sehingga kepemilikan tanah akan</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Setelah terjadi perubahan dari Pemerintah Desa menjadi Kelurahan pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• masih terdapat beberapa bidang tanah yang berasal dari tanah eks bengkok yang belum bersertifikat.</li> </ul>	<p> jelas legalitas kepemilikannya, dan dapat menambah pembendaharaan asset Pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mentertibkan administrasi tentang pertanahan serta kejelasan atas kepemilikan tanah tersebut harus mengeluarkan legalitas kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat.</li> </ul>	
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan data kependudukan / kelurahan tidak mencantumkan jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk (baik masuk / keluar daerah)</li> <li>• Masih kurangnya pemahaman petugas pengelola administrasi kependudukan dalam menyusun laporan data kependudukan.</li> <li>• Masih kurangnya informasi tentang administrasi kependudukan secara umum kepada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data kependudukan harus dikelola dan dilaporkan secara kontinu dan berkala maka perlunya pembinaan terhadap petugas yang menangani masalah administrasi kependudukan maupun plaporannya.</li> <li>• Perlu dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan informasi langsung administrasi kependudukan secara berkelanjutan.</li> </ul>	
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya keterampilan para kader dasa wisma</li> <li>• Masih terdapat rumah tidak layak huni/tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keterampilan para kader dasa wisma</li> <li>• Peningkatan alokasi anggaran untuk pemugaran rumah tidak layak huni/tidak sehat</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memdainya keterampilan SDM guna meningkatkan tambahan pendapatan bagi keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM keluarga guna berinovasi dalam menciptakan produk ataupun pemasarnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga</li> </ul>	
13.	Sosial			Dinas Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya keterampilan SDM PMKS</li> <li>• Terbatasnya pelayanan panti asuhan dalam penanganan PMKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pembekalan keterampilan yang berkelanjutan sehingga PMKS yang dibina mampu untuk mengembangkan keterampilan hidupnya di dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan siap di dalam bersaing di dunia kerja.</li> <li>• Keberadaan panti sosial di Kota Cilegon tetap strategis sebagai salah satu alternatif pelayanan kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penanganan PMKS. Alasan utama panti sosial yaitu sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah di dalam memenuhi hak-hak dasar warganya di dalam memberikan perlindungan.</li> </ul>	
14.	Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memadainya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja dalam mengurangi pengangguran melalui penambahan peserta pelatihan dari seluruh</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
			kelurahan	
15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya koperasi yang berbadan hukum namun dalamkepengurusannya sudah tidak aktif lagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran pembinaan koperasi diutamakan terhadap koperasi-koperasi yang masih berpotensi untuk aktif dan berkembang, sedangkan untuk koperasi yang kepengurusannya sudah tidak aktif akan ditinjau kembali ijin operasionalnya</li> </ul>	
16	Penanaman Modal			Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Penanaman Modal upaya yang masih belum memenuhi percepatan dan perluasan jangkauan promosi perlu promosi yang lebih tepat dan efisien dengan jangkauan yang lebih luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>promosi melalui media website dan homepage.</li> </ul>	
17.	Kebudayaan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum seluruhnya jenis kesenian terpehuni alat keseniannya.</li> <li>Belum lengkapnya sarana dan prasarana sanggar seni budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan alat kesenian untuk setiap seni budaya yang dibina</li> <li>sarana dan prasarana sanggar seni budaya akan dipenuhi secara bertahap</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
18.	Kepemudaan dan Olahraga			Dinas Pemuda dan Olahraga
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya kebutuhan gedung sport centre untuk mendukung keberhasilan Pemuda dan Olahraga dalam berprestasi dan berkeaktifitas</li> <li>Keterbatasan anggaran dalam memenuhi percepatan kebutuhan fasilitas kepemudaahn dan Olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>percepatan pembangunan gedung sport Centre perlu diprioritaskan.</li> <li>Adanya koordinasi yang intensif kepada Departemen/Kementrian Pemuda dan Olehraga karena pembangunan gedung tersebut perlu didukung anggaran dari APBN (Pusat).Terkait dengan hal tersebut anggaran APBD Kota Cilegon akan terbantu.</li> </ul>	
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kesadaran pembinaan Ormas dan LSM dalam merespon program dan kegiatan yang ada di pemerintahan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan tidak maksimal serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, ormas dan LSM dalam mengefektifitaskan program Pembangunan Daerah,</li> <li>Belum mantapnya kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Ormas dan LSM guna mencapai suatu hasil yang maksimal dalam mendukung suatu program dan kegiatan pemerintah agar dapat berjalan secara berkesinambungan antara Ormas / LSM dengan Pemerintah Kota Cilegon.</li> <li>pembinaan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana sehingga masyarakat Kota Cilegon Siap dan sigap bila mana terjadi suatu bencana alam yang tidak diinginkan</li> </ul>	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan obyek dan subyek PBB serta Penilaian Individual PBB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBB masih belum merupakan pajak daerah dan untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang dilaksanakan oleh kantor pajak pratama Cilegon</li> </ul>	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat temuan BPK RI atas pending tahun sebelumnya yaitu temuan Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2010 yang masih dalam proses penyelesaian.</li> <li>• Masih kurangnya pemahaman terhadap administrasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan</li> <li>• Masih banyak pelaksana kegiatan yang belum memahami dan tidak mengetahui adanya peraturan baru yang menyebabkan sering terjadi kesalahan administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu mengutamakan pembinaan dan monitoring berkelanjutan terhadap SKPD dengan mengutamakan penyelesaian yang bersifat pengecualian.</li> <li>• lebih di tingkatkan lagi pembinaan-pembinaan terhadap SKPD dalam memahami administrasi terkait pelaksanaan kegiatan</li> <li>• peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan yang baru segera di informasikan atau di sosialisasikan terhadap SKDP, agar SKPD tersebut lebih memahami tentang aturan yang berlaku dengan demikian diharapkan akan mengurangi tingkat kesalahan pada pelaksanaan kegiatan tersebut</li> </ul>	Inspektorat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya <b>kesadaran</b> masyarakat mentaati ketentuan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan upaya sosialisasi melalui mass media, penyebaran brosur-brosur, pembuatan</li> </ul>	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Kepala Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak personil yang masih kurang skill dalam pelaksanaan pekerjaan</li> <li>Masih kurangnya koordinasi dengan lintas SKPD dalam menyelesaikan permasalahan yang ada</li> </ul>	<p>spanduk, pembuatan plang himbauan dan penyuluhan-penyuluhan di tempat-tempat umum terkait dengan pemahaman Perda dan Peraturan walikota lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti diklat maupun bimbingan teknis dan sosialisasi-sosialisasi</li> <li>Peningkatan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih rendah dilihat dari sektor pendidikan.</li> <li>belum semuanya pejabat aparatur pemerintah Kota Cilegon yang telah memenuhi persyaratan jenjang karir aparatur, dari total jumlah pejabat aparatur Kota Cilegon sebanyak 799 pegawai baru 583 pegawai yang telah mengikuti diklat kepemimpinan atau dengan kata lain baru mencapai 72,97 % yang telah mengikuti diklatpim.</li> <li>Kota Cilegon belum memenuhi standar minimal ISO. yang menerapkan SOP baru 2 SKPD serta yang mendapatkan ISO baru 1 SKPD</li> <li>Masih kurangnya/belum terisi penuh aparatur yang ada di tingkat Kelurahan</li> <li>Masih kurangnya sarana dan prasarana yang representative di tingkat kelurahan Solusi Dalam rangka mempercepat pembangunan dan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan suntikan dana bagi aparatur yang mengikuti tugas belajar dan bantuan pendidikan S1,S2 dan S3, dengan demikian disiplin ilmu yang dimiliki dapat meningkatkan SDM aparatur. Selain itu pemerintah daerah harus lebih memotivasi bagi para aparatur untuk meningkatkan karir dan disiplin ilmu</li> <li>Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon, secara bertahap mengirim peserta diklat untuk pemenuhan persyaratan pejabat yang telah menduduki jabatan sehingga selain menjadi prasyarat akan menambah wawasan serta ilmu serta lebih profesional dalam mengemban tugas sebagai aparatur pemerintah.</li> <li>Perlu memacu SKPD-SKPD yang ada untuk memenuhi ISO yang dipersyaratkan yaitu minimal terpenuhi 6 ISO</li> <li>Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia</li> </ul>	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	<p>(SDM) di Kelurahan dalam mengisi kekosongan pejabat kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pembangunan sarana dan prasarana ti tingkat kelurahan yang representative guna mendukung pelayanan terhadap masyarakat.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Fasilitas hidran / sumber air minum</li> <li>• Masih kurangnya truk pemadam dan mobil tangki air</li> <li>• Masih kurangnya peralatan damkar dan rescue</li> <li>• Masih kekurangan pegawai</li> <li>• Masih kurangnya petugas yang ahli kimia dan masih kurang trampil dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban.</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi antar SKPD pemberi ijin dalam bidang proteksi kebakaran pada bangunan gedung Kondisi padat hunian dan padat penduduk, rumah saling berdempetan</li> <li>• Jalan-jalan lingkungan sempit &amp; adanya portal permanen sehingga akses bagi petugas pemadam sulit</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran</li> <li>• Masih banyak Bangunan termasuk bangunan Pemda Tidak Memiliki Peralatan Proteksi Kebakaran</li> <li>• Pada saat terjadi kebakaran sering terlambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya koordinasi yang lebih baik antar SKPD dalam pemenuhan kebutuhan Hidran</li> <li>• Perlunya penambahan truk pemadam dan mobil tangki air sesuai dengan rasio kebutuhan</li> <li>• Perlunya memenuhi ketersediaan peralatan damkar dan rescue</li> <li>• Penambahan armada pasukan pemadam</li> <li>• Meningkatkan kualitas SDM terutama dalam keahlian Kimia dan ketrampilan pemadam kebakaran serta penyelamatan korban.</li> <li>• Meningkatkan akuntabilitas kinerja kantor pemadam kebakaran yang jelas dan terukur</li> <li>• Meningkatkan kapasitas daya dukung dan kualitas kelembagaan SKPD dengan kantor Damkar</li> <li>• Perlu kesiapan peralatan dan sistematis tindakan dalam menangani jalan lingkungan sempit dan portal permanen</li> <li>• Perlunya sosialisasi akan bahaya kebakaran ke masyarakat</li> <li>• Perlunya kontrol dan pengawasan yang lebih efektif</li> </ul>	Kantor Pemadam Kebakaran

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		menghubungi Instansi Pemadam Kebakaran	terhadap kepemilikan peralatan proteksi kebakaran • Perlunya kajian sistematis dalam mengatasi keterlambatan pemberitahuan kebakaran	
21.	Ketahanan Pangan			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
		• masih lemahnya tingkat koordinasi antar SKPD dalam penguatan kelembagaan DKP.	Perlunya peningkatan koordinasi lintas SKPD yang terkait ketahanan pangan guna penguatan kelembagaan DKP	
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
		Pemberdayaan masyarakat sosial (raskin) : • Warna beras yang di distribusikan kurang bagus • Kurangnya timbangan beras yang di distribusi • Ongkos angkut sering telat	• koordinasikan ke bulog tentang kualitas beras • perlu ada pemeriksaan sebelum pendistribusian ke masyarakat terhadap berat timbangan • perlunya ada koordinasikan ke bagian keuangan masalah ongkos angkut.	
		Pemberdayaan di bidang TTG • Kurang aktifnya pengurus wartek/posyantek • Kurang kontrol/monitoring pengurus wartek/posyantek terhadap alat-alat yang berada di masyarakat • Masih kurang minat masyarakat untuk ikut kegiatan	Pemberdayaan TTG : • Perlu adanya pembinaan untuk pengurus posyantek dan wartek oleh tim Kota. • Perlu dilakukan secara berkala kontrol/monitoring alat-alat wartek/posyantek yang berada di masyarakat	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		lomba cipta TTG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbanyak promosi tentang lomba cipta TTG</li> </ul>	
		Pemberdayaan di bidang ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>Pinjaman dana bergilir di pandang sebagai hibah</li> <li>Tingginya tunggakan pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet yang ada di mitra binaan</li> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban</li> <li>Produk mitra binaan tidak dapat bersaing terutama dalam kualitas dan harga.</li> <li>Aparatur di tingkat kelurahan tidak dilibatkan dalam rekrutasi, seleksi dan pemcairan calon wira usaha usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dana yang disalurkan adalah dana pinjaman untuk modal usaha.</li> <li>Melakukan sosialisasi kepada mitra binaan yang mampu tapi tidak mau membayar pinjaman.</li> <li>Pembinaan (monitoring) ke mitra binaan lebih intensif.</li> <li>Telah dibukanya trading house sebagai sarana promosi hasil UKM masyarakat cilegon.</li> <li>Adanya koordinasi ke tingkat kelurahan dalam rekrutasi seleksi dan pencairan.</li> </ul>	
<b>23.</b>	<b>Statistik</b>			<b>Bappeda</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>masih belum dapat di tebitkananya kebutuhan data di awal tahun, dan masih ada beberapa data yang masih tumpang tindih keakuratannya jika di bandingkan dengan data dari para pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk penyusunan data statistik agar dapat mengeluarkan data proyeksi terhadap data data pembangunan agar dapat menjadi bahan acaun pembangunan</li> </ul>	
<b>24.</b>	<b>Kearsipan</b>			<b>Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Optimalnya penataan Kearsipan di setiap SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif di setiap SKPD</li> </ul>	
<b>25.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			<b>Sekretariat Daerah</b>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Cilegon belum menerapkan e-gov sebagai sarana yang sangat diharapkan untuk memulai budaya kerja efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sosialisasi yang memadai agar para pelaku birokrasi dan masyarakat mampu memahami e-gov untuk kemudian mendayagunakan potensinya, sehingga dapat memperbaiki mutu pelayanan publik kepada seluruh masyarakat</li> </ul>	
26	Perpustakaan			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya rasa ingin tahu masyarakat tentang ilmu pengetahuan melalui perpustakaan.</li> <li>Masih rendahnya minat baca masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Perpustakaan di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Cilegon.</li> <li>Mengembangkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat secara berkelanjutan</li> </ul>	
B.	Urusan Pilihan			
1.	Pertanian			Dinas Pertanian dan Kelautan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tercapainya target produksi padi karena disebabkan oleh cuaca dimana curah hujannya rendah sehingga mengalami kekeringan.</li> <li>Masih rendahnya produksi melon akibat serangan organisme pengganggu tanaman seperti (bercak daun dan kerring)</li> <li>Kurangnya pemahaman petani dalam hal penerapan budidaya melon terkait dengan penggunaan sarana produksi seperti pestisida dan pupuk.</li> <li>Masih tingginya harga pakan unggas, sehingga perlu mencari pakan alternatif yang banyak tersedia,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peralihan terhadap komoditas pangan lain yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tanah kota Cilegon.</li> <li>Perlu penerapan budidaya yang baik dan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.</li> <li>Penggunaan pestisida yang tepat sasaran dan sesuai dengan anjuran yang berlaku baik bahan aktif dan konsentrasi penggunaannya.</li> <li>Memberikan informasi secara luas kepada peternak mengenai keanekaragaman tanaman hijau ternak</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>murah dan bermutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terbiasanya masyarakat mengkonsumsi produk susu kambing karena masih kurangnya promosi.</li> </ul>	<p>yang ada sekitarnya dan mengenalkan tanaman obat untuk ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenalkan masyarakat produk susu kambing dalam bentuk kemasan secara luas dan manfaat mengkonsumsi susu bagi manusia</li> </ul>	
2	Energi dan Sumber Daya Mineral			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kurangnya ketersediaan water meter pada instalasi pengambilan air bawah tanah perusahaan, sehingga menyebabkan tidak tercatatnya besaran pemakaian air perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukannya pengadaan water meter pada anggaran selanjutnya guna memenuhi kebutuhan water meter</li> </ul>	
3	Pariwisata			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya pengembangan sarana dan prasarana Obyek Daerah Tujuan Wisata Kota Cilegon karena belum seluruhnya ODTW memiliki perencanaan pembangunan secara detail yang siap pelaksanaan konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan perencanaan dan pengembangan ODTW di Kota Cilegon</li> </ul>	
4.	Kelautan dan Perikanan			Dinas Pertanian dan Kelautan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menentunya cuaca yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut.</li> <li>• Peralatan nelayan yang masih sangat tradisional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan budidaya perikanan darat/air tawar yang tidak tergantung perubahan cuaca.</li> <li>• Perlunya bantuan untuk modernisasi peralatan nelayan.</li> </ul>	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya PPI sebagai sarana untuk melakukan aktifitas transaksi perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berusaha agar kementrian kelautan dan perikanan dapat memberi bantuan kelanjutan pembuatan PPI di Kota Cilegon.</li> </ul>	
5.	Perdagangan			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tertatanya pedagang yang berjualan diluar area peruntukannya seperti para pedagang yang menempati sub terminal merak dan pedagang di sepanjang jalan pagebangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu adanya relokasipara pedagang di sub terminal merak ke pasar merak dan pedagang sepanjang pagebangan ke pasar blok F.</li> </ul>	
6.	Industri			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pelaku industri kecil sehingga menjadi kendala dalam pengembangan Industri kecil di Kota Cilegon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pengetahuan Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan dalam meningkatkan proses produksi</li> </ul>	



## 4.2. ISU STRATEGIS

Berpijak pada kondisi, hasil evaluasi pembangunan dan identifikasi permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Cilegon sampai dengan tahun 2012 maka **isu strategis** dan **permasalahan pokok** pembangunan Kota Cilegon dalam periode tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

### 1. KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Cilegon. Kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial merupakan beberapa indikator pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan manusia yang merupakan tujuan utama dari pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu ketiga komponen ini juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan pembangunan di Kota Cilegon.

Tingkat kemiskinan di Kota Cilegon masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun jumlah dan proporsi jumlah rumah tangga miskin sudah terus berkurang, tetapi keberlanjutan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon kedepan ditargetkan mampu menekan kembali proporsi jumlah rumah tangga miskin seoptimal mungkin.

Demikian halnya beban permasalahan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya, serta meningkatnya eksekse dan gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan sosial perkotaan yang perlu ditangani meliputi masalah prostitusi, kriminalitas, anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya.

Pembangunan Kota Cilegon dalam 5 tahun mendatang dihadapkan pada berbagai tantangan yang menyangkut terjadinya perubahan-perubahan yang diharapkan semakin baik pada seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka menggiring

perubahan-perubahan sebagaimana diharapkan tersebut, maka perlu dibangun kerangka pencapaian pembangunan Kota Cilegon untuk lima tahun ke depan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Kota Cilegon akan mengalami tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2010 sebesar 374.464 orang diproyeksikan akan terus meningkat mencapai sekitar 409.142 jiwa hingga tahun 2015, dengan asumsi semakin membaiknya berbagai parameter kependudukan seperti menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi serta rendahnya angka migrasi penduduk.

Dengan demikian diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan hingga menjadi 1,54% per tahun dalam rentang periode 2010-2015. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang, antara lain dengan tercapainya komposisi penduduk usia produktif yang lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif, terkendalinya persebaran dan kepadatan penduduk, serta dapat ditekannya angka pengangguran dan migrasi masuk.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kota Cilegon juga diperkirakan akan semakin meningkat menjadi 76,97 hingga tahun 2015, terutama dengan adanya upaya pelayanan pendidikan yang berkualitas yang berorientasi pada peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta peningkatan daya saing dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pembangunan.

Namun dukungan upaya peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu menekan angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, proporsi balita kurang gizi, serta kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan oleh seluruh kelompok masyarakat. Kualitas kesehatan juga diharapkan

didukung dengan peningkatan kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Cilegon masih akan menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Meskipun proporsi rumah tangga miskin sepanjang 10 tahun terakhir sudah terus berkurang, tetapi keberlanjutan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon kedepan ditargetkan mampu menekan kembali proporsi rumah tangga miskin dengan variabel penerima program BLT/BML, dari 15.961 RTS, menjadi kurang dari 8.000 RTS. Sedangkan sasaran pengurangan angka kemiskinan dengan variabel garis kemiskinan (pengeluaran perkapita kurang dari Rp. 198.000,- perbulan), akan ditekan hingga mencapai 2,25% pada tahun 2015.

Di samping itu, tantangan permasalahan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya, meningkatnya ekses dan gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian penting dalam kerangka pembangunan lima tahun ke depan. Permasalahan sosial perkotaan yang perlu ditangani diantaranya meliputi masalah PMKS, kriminalitas, anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya.

Issue penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah issue pengangguran. Dalam hal ini konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*), yang disebut dengan pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Prosentase dari pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja merupakan tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang pada tahun 2008 mencapai 18,65% dan pada tahun 2009 adalah sebesar 18.26% menurun sebesar 10.1% pada tahun 2015.

Masih tingginya TPT, menunjukan bahwa masalah pengangguran masih merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah ke depan, yang memerlukan adanya sinergitas antara seluruh stakeholder pembangunan.

Pertumbuhan lapangan kerja, tentu harus disokong oleh peningkatan investasi di daerah, yang dalam hal ini sangat bergantung pada stabilitas keamanan di daerah dan aspek legislasi dalam hal ini kemudahan birokrasi. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga harus dikedepankan. Untuk mengurangi terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja, perlu adanya *link and match* antara pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Mengacu kepada visi jangka panjang pemerintah daerah sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, maka muatan pendidikan seyogyanya lebih diarahkan kepada tiga sector tersebut. Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, ketiga sector tersebut merupakan sector yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu kemiskinan, kesejahteraan sosial dan pengangguran di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Penurunan jumlah penduduk miskin;
- Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga;
- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan administrasi kependudukan;
- Perluasan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat pengangguran.

## **2. DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH**

Struktur perekonomian daerah Kota Cilegon yang didominasi oleh sektor industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerawanan sosial. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Cilegon bukan merupakan industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian

husus. Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri, strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UMKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam pekerkomian daerah, serta mampu mendukung kinerja sektor industri daerah.

Sementara itu, persaingan perekonomian yang lebih ketat dan kompetitif merupakan tantangan bagi Kota Cilegon seiring dengan diberlakukannya pasar bebas Asean (AFTA) dan pasar bebas Asean-Cina (AC-FTA) yang bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Globalisasi dan pasar bebas di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas maka akan kalah bersaing dengan produk asing yang hal ini tentunya akan merugikan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, selama periode 2004-2009 pembangunan perekonomian Kota Cilegon menunjukkan proses kemajuan, yang ditandai dengan peran sektor sekunder sebagai tumpuan utama struktur ekonominya. Secara bertahap perekonomian Kota Cilegon diharapkan terus meningkat dimasa mendatang, yang ditunjukan dengan **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)** Kota Cilegon hingga tahun 2015 diperkirakan berkisar antara 5,86%.

Pengkondisian pembangunan ekonomi Kota Cilegon tersebut dalam proses pencapaiannya diharapkan disertai dengan kondisi stabilitas ekonomi, kondisi keamanan yang semakin kondusif, tidak terjadinya bencana dalam skala besar, **inflasi YoY** yang berkisar antara **5,00 - 7,50%**, **ICOR** yang berkisar antara **2,96 - 2,70**, serta **ILOR** yang berkisar antara **1,00 - 0,52** sepanjang kurun waktu tahun tersebut.

Sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, serta sektor bangunan) hingga tahun 2015 masih memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun dengan kecenderungan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang relatif stagnan. Sektor Bangunan merupakan tumpuan utama dalam penciptaan lapangan kerja, sebagaimana yang telah ditunjukkan selama periode 2000-2009 dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dari kontribusi ekonominya.

Selain itu, kebutuhan pembangunan fisik kota akan semakin meningkat di masa mendatang, sehingga Sektor Bangunan akan memiliki peran strategis dalam penyediaan lapangan kerja. Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih lebih merupakan sektor padat modal dan padat teknologi, sehingga perannya dalam penyerapan tenaga kerja tidak sebaik Sektor Bangunan.

Persaingan perekonomian yang lebih ketat merupakan tantangan bagi Kota Cilegon seiring dengan diberlakukannya pasar bebas Asean (AFTA) dan pasar bebas Asean-Cina (AC-FTA) yang bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Globalisasi dan pasar bebas di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas maka akan kalah bersaing dengan produk asing yang hal ini akan merugikan ekonomi daerah.

Perekonomian Kota Cilegon yang di dominasi oleh sektor sekunder, tentunya relatif rentan terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama dengan munculnya kebijakan pusat, seperti kebijakan kenaikan BBM, kenaikan suku bunga, instabilitas politik, penurunan nilai tukar, dan sebagainya.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu daya saing perekonomian di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi didukung investasi;

- Kualitas perekonomian dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- Produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian khususnya di sektor industri;
- Kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal;
- Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan.

### **3. KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH, TATA RUANG, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur serta fasilitas kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur wilayah adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu.

Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota adalah:

**(1) Kemacetan dan pelayanan transportasi yang belum mencapai tingkatan nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan**

Ditinjau dari sudut pandang mikro, kemacetan yang terjadi dapat ditimbulkan oleh akumulasi dari ketidakdisiplinan pengguna jalan, pelanggaran penggunaan trotoar bagi kegiatan sektor informal (pedagang kaki lima), dan pengelolaan parkir yang buruk. Sedangkan dari sudut pandang makro, kemacetan disebabkan oleh ketimpangan antara kemampuan pelayanan sistem pusat pelayanan kegiatan dengan kapasitas dan volume pergerakan serta melebihinya (over-burden) daya tampung pelayanan jalur protokol kota di mana secara spasial posisinya terlalu dekat dengan pusat-pusat permukiman. Kondisi ini diperparah dengan jarak antar bukaan jalan yang relatif berdekatan sehingga stagnasi kendaraan terakumulasi menjadi sebuah kemacetan. Keberadaan sarana angkutan umum pun belum mampu menjadi alternatif dalam melakukan pergerakan sehingga penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan utama. Hal ini perlu menjadi isu strategis agar sistem perencanaan kota ke depan dapat mengatur pola pergerakan kawasan perkotaan sehingga menjadi lebih efektif.

**(2) Kualitas kondisi dan kinerja jaringan jalan**

Secara umum kondisi jalan di Kota Cilegon cukup baik dalam arti mampu menghubungkan antar sistem pusat pelayanan perkotaan. Dengan semakin tingginya konsentrasi pengembangan lahan perlu ditunjang oleh perencanaan sistem jaringan jalan yang mampu menjadi inisiator dalam setiap kegiatan pengembangan lahan sehingga struktur ruang kota menjadi lebih terbentuk. Penyertaan saluran drainase jalan pun perlu menjadi bagian dalam perencanaan jalan mengingat kerusakan struktur jalan lebih disebabkan oleh sistem drainase jalan yang buruk selain tonase kendaraan yang melintasi jalan melebihi batas.

Kinerja jaringan jalan diukur dari seberapa besar kapasitas jalan baik secara fungsional maupun struktural mampu menampung beban pergerakan serta meningkatkan nilai aksesibilitas kawasan. Kinerja jaringan jalan perlu disertai dengan pengendalian ruang jalan dan pemaduserasian dengan karakteristik aktivitas di sekitarnya. Menurunnya kinerja jaringan jalan dapat dilihat antara lain



diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi kemacetan, rusaknya struktur jalan, serta lambatnya pertumbuhan kawasan. Ruas jalan protokol dan ruas jalan yang secara langsung terkoneksi dengan jalan protokol menjadi objek penting dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja sistem transportasi.

### **(3) Bencana banjir**

Banjir menjadi permasalahan pokok, karena fenomena ini sering terjadi terutama pada musim penghujan. Sebagian besar penyebab banjir di Kota Cilegon antara lain tidak terintegrasinya sistem drainase kawasan, peningkatan volume larian air di bagian hulu sebagai efek dari tingginya pembukaan lahan, sedimentasi drainase dan pantai, dan berkurangnya kemampuan infiltrasi tanah terhadap air hujan. Di samping menimbulkan berkurangnya kenyamanan, banjir pun akan berdampak pada menurunnya kualitas jalan dan kesehatan lingkungan.

### **(4) Ketersediaan air baku serta cakupan dan kualitas pelayanan air bersih**

Perlu disadari bahwa Kota Cilegon tidak memiliki sumber air baku. Selama ini kebutuhan air baku untuk pelayanan kebutuhan air bersih dipasok dari rawa Cidanau (Kabupaten Serang). Meningkatnya kebutuhan air ini tidak disertai dengan bertambahnya jumlah air baku sehingga berpengaruh terhadap pelayanan air bersih. Di sisi lain masyarakat menuntut pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya adalah peningkatan cakupan pelayanan air bersih (terutama berbasis perpipaan).

### **(5) Cakupan dan kualitas pelayanan persampahan**

Pengelolaan persampahan yang terdapat di Kota Cilegon sampai saat ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah permukiman. Daerah pelayanan masih terbatas pada jalan utama dan beberapa kawasan permukiman saja. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dan kendala dalam pemenuhan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, keterbatasan sistem operasional persampahan dan pendekatan/teknologi yang digunakan, serta belum adanya mekanisme kerjasama dalam pengelolaan sampah dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan hingga pembuangan akhir. Saat ini isu pengelolaan persampahan telah beralih dari paradigma kumpul – angkut – buang ke arah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di mana peran TPA merupakan tempat penampungan sampah yang memang sudah tidak dapat lagi diolah. Selain itu isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu perlu adanya perubahan metode pengelolaan sampah di TPA yang semula menggunakan sistem open-dumping beralih ke controlled-landfill menuju sanitary landfill.

**(6) Kualitas pelayanan pengelolaan limbah**

Pembuangan air kotor (mandi dan cuci) pada saat ini bergabung dengan sistem drainase, hal ini dapat menurunkan kualitas air permukaan di sungai-sungai yang menjadi saluran primer drainase. Untuk itu selayaknya dibatasi pembuangan air kotor secara langsung ke badan air (saluran drainase) serta dilakukan upaya pemisahan antara saluran air kotor dengan saluran drainase. Jenis pengelolaan air limbah domestik sebagian besar masih berorientasi pada sistem on-site sanitation. Sedangkan sistem off-site sanitation baru dikembangkan pada beberapa kawasan permukiman padat (MCK, WC umum). Sistem pengelolaan limbah domestik yang lebih modern seperti sewerage system belum diaplikasikan, padahal sistem ini berpeluang untuk mengatasi pembuangan limbah domestik ke badan air secara langsung. Untuk jenis limbah industri sebagian besar telah dikelola secara internal melalui penerapan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Meskipun demikian pengawasan dan pemantauan atas kualitas mekanisme pengelolaan limbah terutama untuk jenis B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) perlu mendapat perhatian mengingat tingginya dampak yang dapat ditimbulkan apabila tidak dikelola secara baik.

**(7) Penyediaan dan kualitas rumah layak huni dan terjangkau**

Kebutuhan akan hunian akan semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Tingginya nilai lahan perkotaan tentunya menjadi pertimbangan tersendiri dalam upaya penyediaan lahan bagi rumah layak huni. Apabila isu ini tidak diperhatikan secara spesifik, maka jumlah permukiman padat-

kumuh dipastikan akan bertambah. Dengan demikian perlu adanya pendekatan yang strategik dalam mengatasi penyediaan rumah layak huni, misalnya melalui program penyediaan rumah susun.

#### **(8) Kawasan permukiman kumuh**

Permukiman kumuh dicirikan dengan struktur jalan yang organik, jarak antar bangunan yang padat, serta kondisi lingkungan yang tidak tertata. Kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan pembangunan jangka menengah karena apabila tidak ditangani secara simultan akan berakibat pada menurunnya tingkat kesehatan lingkungan, rawan bencana kebakaran, konflik sosial dan kriminalitas, serta menurunnya identitas dan estetika kota. Berdasarkan studi tentang kawasan kumuh, terdapat 14 titik kawasan kumuh yang perlu mendapatkan perhatian agar kawasan tersebut tidak semakin menurun kualitasnya.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang adalah:

##### **(1) Lingkungan Hidup**

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, secara umum Kota Cilegon akan mengalami perubahan geomorfologi dan lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup karena faktor manusia jika tidak diantisipasi akan terus meningkat. Pencemaran air, udara, dan tanah di Kota Cilegon berpotensi meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan dan perubahan pola hidup masyarakat. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan pencemaran perlu diupayakan pada kawasan-kawasan potensi pencemaran, khususnya kawasan industri, kawasan pelabuhan dan kawasan permukiman.

Namun harus digarisbawahi bahwa meskipun telah disusun mekanisme pengendalian dampak lingkungan, akan tetapi pengelolaan lingkungan hidup yang parsial hanya akan mampu memperlambat penurunan kualitas lingkungan saja dan tidak mampu menyelesaikan masalah sampai tuntas. Beberapa wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri seperti di Kelurahan Kepuh, Kelurahan

Randakari, Kelurahan Gerem, Kelurahan Suralaya, Kelurahan Lebakgede, dan beberapa wilayah lainnya telah terindikasi sebagai daerah yang telah menurun kualitas lingkungannya seperti polusi udara yang tinggi, debu batubara dan bau dari limbah industri yang tidak sedap, kebisingan, meningkatnya penderita ISPA, menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah, dan sebagainya.

Selain pencemaran, Kota Cilegon menghadapi ancaman krisis energi, krisis lahan, dan krisis air bersih karena sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan pesisir. **Krisis energi** terkait dengan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan energi seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Sementara **krisis lahan** terkait dengan semakin terbatasnya lahan bagi aktifitas penduduk serta adanya kerusakan lahan yang salah satunya diakibatkan oleh kegiatan pertambangan Galian C. Adapun **krisis air bersih** terkait dengan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas air permukaan maupun air tanah. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan intensitas kegiatan baik industri maupun non-industri akan berdampak pada semakin tingginya demand akan kebutuhan air. Kondisi tersebut dipertegas dengan potensi air baku yang rendah sehingga kebutuhan air dipenuhi melalui pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan air bawah tanah tanpa disertai dengan langkah konservasi air tentunya akan menimbulkan serangkaian dampak seperti rongga bawah tanah yang memicu deformasi tanah dan subsident, intrusi air laut, dan kelangkaan air tanah. Indikasi dari berkurangnya kualitas dan kuantitas air tanah dapat ditelusuri dari adanya perubahan warna dan rasa air tanah di sekitar peisisir pantai yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan peningkatan derajat kekeruhan air sebagai cerminan dari adanya kejenuhan material tanah/lumpur dalam air.

Bencana alam dan bencana industri masih merupakan ancaman bagi Kota Cilegon dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, diantaranya ancaman yang bersumber dari aktifitas Gunung Krakatau, maupun potensi terhadap dampak aktifitas gempa dan tsunami yang terjadi di daerah selatan Pulau Jawa, dimana salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak yang lebih luas atas

bencana tersebut terkait dengan keberadaan industri-industri kimia pada kawasan pesisir. Sehingga tantangan dimasa mendatang adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana (tanggap darurat).

Isu pembangunan berkelanjutan juga menjadi paradigma pembangunan yang saat ini terus bergulir seiring dengan merebaknya isu global warming yang ditimbulkan oleh kepadatan aktivitas dan jumlah manusia tanpa mengindahkan upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan tanpa adanya pengelolaan lingkungan tentunya akan berakibat pada keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Maka pelestarian kawasan pesisir perlu menjadi isu strategis karena kondisi garis pantai saat ini hampir 70% telah terisi oleh kegiatan budidaya baik industri, pelabuhan, permukiman, sarana kota, dan bangunan komersil serta peran Selat Sunda sebagai jalur perairan internasional. Dampak yang perlu diperhitungkan bukan hanya terhadap kelestarian kawasan pesisir semata, akan tetapi pengelolaan yang tidak terintegrasi akan berdampak pada eksistensi dan kelangsungan penyelenggaraan kegiatan dan investasi di kawasan pesisir. Sedangkan daerah perbukitan di bagian utara dan selatan kota perlu dikelola dan dilestarikan karena perannya yang sangat penting sebagai pelindung kawasan perkotaan dari hempasan angin laut yang membawa material polutan dari kawasan industri, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau, penyerap air hujan, dan penyeimbang kualitas lingkungan. Tidak kalah strategis pula peran sungai-sungai yang tersebar sebagai bagian dari sistem drainase kota. Tanpa pengelolaan atasnya, maka fenomena banjir dan genangan air akan berdampak sistemik terhadap kelestarian fasilitas kota dan kualitas lingkungan.

## **(2) Penataan Ruang**

Terkait dengan pemanfaatan ruang, permasalahan utama yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya pelanggaran tata ruang, baik berupa pelanggaran fungsi ruang maupun pelanggaran tata bangunan dan lingkungan. Hal ini antara lain disebabkan oleh : (1) belum memadainya ketersediaan dasar hukum

pelaksanaan penataan ruang baik yang bersifat umum maupun rinci, sebagai landasan operasional yang sangat penting bagi penanganan masalah penataan ruang; (2) kurangnya SDM yang menguasai masalah penataan ruang; (3)kurang berfungsinya lembaga koordinasi penataan ruang di daerah, merupakan hal yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan penataan ruang di daerah; (4) Terbatasnya jumlah personil penataan ruang serta (5)kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penataan ruang

#### **4. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Isu kualitas sumberdaya manusia merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Cilegon. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia.

Upaya pelayanan pendidikan yang berkualitas yang berorientasi pada peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta peningkatan daya saing dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pembangunan merupakan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Disamping itu dukungan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat diharapkan mampu menekan angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, proporsi balita kurang gizi, serta kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan oleh seluruh kelompok masyarakat. Kualitas kesehatan juga diharapkan didukung dengan peningkatan kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu kualitas sumberdaya manusia di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Aktualisasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- Pelestarian dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya;
- Aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat;
- Aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat.

#### 5. KINERJA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SERTA KUALITAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DEMOKRASI DAN HUKUM

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
- Kapasitas dan kemandirian keuangan daerah;
- Kualitas kehidupan demokrasi;
- Ketaatan dan supremasi hukum;
- Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.